



Propam Dalam SOP Pengamanan Diskusi FTA



SOAL 5 TERSANGKA KORUPSI PPPK LANGKAT TIDAK DITAHAN

LBH Medan: Polda Sumut Permalukan Institusi Polri

Medan, MIMBAR – Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan seleksi PPPK Langkat tahun 2023 mengalami kemunduran dan terbang pilih penegakan hukum.

Dalam kasus ini Polda Sumut telah menetapkan lima tersangka yaitu Kadis Pendidikan, BKD, dan Kasi Kesiswaan SD Didik Kabupaten Langkat serta dua kepala sekolah, Rohayu Ningsih dan Awaluddin. Namun, parahnya 5 Tersangka tersebut tidak ditahan dengan alasan kooperatif.

■ Bersambung ke Hal 11

11 ANGGOTA POLISI DIPERIKSA

Jakarta, MIMBAR - Polda Metro Jaya menyatakan telah memeriksa pelaksanaan SOP pengamanan kegiatan acara diskusi Forum Tanah Air (FTA) yang dibubarkan paksa oleh sekelompok orang, pada Sabtu (28/9) kemarin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pemeriksaan dialami oleh Bidang Propam lewat pemeriksaan terhadap 11 anggota termasuk Kapolsek Mampang Kumpul Edy Purwanto.

■ Bersambung ke Hal 11



Kapolri: Tindak Tegas

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran Korps Bhayangkara untuk menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan kelompok

■ Bersambung ke Hal 11



■ Bersambung ke Hal 7

■ Bersambung ke Hal 7

AMANKAN PELANTIKAN ANGGOTA DPR Polda Metro Kerahkan 5.614 Personel

Jakarta, MIMBAR - Polda Metro Jaya mengerahkan total 5.614 personel untuk mengamankan kegiatan pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024-2029, pada Selasa (1/10) besok.

“Telah dilaksanakan apel pengamanan pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI. Kekuatan personel

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

27 RABIUL AWAL 1446 H

Subuh : 04:58 WIB	Maghrib : 18:20 WIB
Zuhur : 12:18 WIB	Isya : 19:28 WIB
Ashar : 15:28 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

POLEMIK KEPENGURUSAN PWI PUSAT

Hendry CH Bangun Tegaskan Jaga Integritas Organisasi

Jakarta, MIMBAR - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa PWI Pusat dengan tegas menolak PWI versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas kelompok tertentu. Ia menegaskan, organisasi yang sah secara hukum tidak akan tunduk pada tekanan yang tak berdasar. Hendry juga memastikan bahwa PWI Pusat akan terus menjaga integritas organisasi serta tetap membuka peluang dialog demi solusi yang adil dan transparan.

“Kami akan menjaga kantor



PWI dan memastikan tidak ada anggota atau pihak luar yang masuk tanpa izin. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen

kami untuk menjaga integritas organisasi,” tegas Hendry Ch Bangun dalam rapat pengurus harian yang juga dihadiri Plt pengurus provinsi di Sekretariat PWI Pusat, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (30/9).

Hendry menyebut kelompok yang berupaya mengadakan KLB ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kelompok yang berjumlah sekitar 30 hingga 40 orang tersebut sempat berusaha masuk ke kantor PWI Pusat, namun ditolak.

■ Bersambung ke Hal 7

1 Oktober 2024, Dilantik Menjadi Anggota DPD RI Periode Kedua

M. Nuh Bicara Sisi Minus DPD RI

GENAP 5 tahun menjadi anggota DPD RI mewakili Provinsi Sumatera Utara Tentu bisa dikatakan rentang waktu yang memadai untuk dapat berbuat bagi kebaikan daerah pemilihannya; dan bisa juga dianggap waktu yang singkat untuk dapat dirasakan hasil kerjanya.

Terkait dengan keberadaan DPD RI, yang merupakan implementasi dari amandemen UUD (Undang-undang Dasar) Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengubah keanggotaan MPR RI, yang sebelumnya terdiri atas anggota DPR RI yang mewakili Partai

Politik, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Kedua bagian terakhir (Utusan Daerah dan Utusan Golongan) ditunjuk melalui mekanisme yang ada ketika itu, menjadi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu.

Jumlah anggota DPD RI 4 orang dari setiap provinsi. Pada Pemilu 2019 yang diikuti 34 provinsi. Jumlah anggota DPD RI 136 orang dari seluruh Indonesia. Sementara pada Pemilu 2024, jumlah provinsi bertambah dengan adanya pemekaran di Papua dan Papua Barat menjadi 38 provinsi. Maka jumlah anggota DPD RI hasil pemilu 2024 sebanyak 152 orang.

■ Bersambung ke Hal 11



Hidayah

Diskusi Kebangsaan

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)

DISKUSI kebangsaan tentu-lah menjadi sangat penting untuk menjaga keberagaman pendapat dan memfasilitasi konsensus dalam masyarakat. Pembubaran diskusi kebangsaan bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan sistem demokrasi.

Rakyat cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi jika pemerintah berhasil dalam mengatasi isu-isu ekonomi, kesehatan, dan keamanan.

■ Bersambung ke Hal 11

LBH Medan...

Dari Halaman 1

Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan besar masyarakat khusus guru honorer yang menjadi korban, mengapa kelima tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi ini tidak ditahan?

"LBH Medan selaku kuasa hukum para guru PPPK Langkat yang menuntut haknya menilai jika Polda telah mempermalukan institusi Polri dan diduga memberikan privilege (keistimewaan) terhadap para tersangka," ungkap Direktur LBH Medan, Irvan Saputra SH MH, Senin (30/9).

Hal tersebut, dijelaskan Irvan, bisa dilihat secara terang benderang dalam kasus PPPK Madina dan Batubara yang juga ditangani Polda Sumut.

Di Kabupaten Madina sebanyak 6 tersangka dan Batubara 5 tersangka kesemuanya dilakukan penahanan. Namun tidak bagi di Kabupaten Langkat yang 5 terangkanya tidak ditahan hingga sampai saat ini.

"LBH Medan menilai Polda Semua telah menorehkan sejarah terburuk dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia khusus Sumut," tegasnya.

Maka, LBH Medan secara tegas meminta kepada Kapolda Sumut dan Dirkrimsus untuk segera melakukan penahanan terhadap kelima tersangka sebagaimana amanat dalam Pasal 21 KUHAP.

"Tidak hanya itu LBH Medan juga mendesak Polda Sumut segera me-

netapkan aktor utamanya sebagai tersangka. Dimana LBH Medan menduga jika dalam kasus PPPK Langkat ada keterlibatan Plt. Bupati dan Sekda Langkat (Selaku Ketua Panselda)," tuding Irvan.

Dijelaskan Irvan, permasalahan PPPK Langkat bukan hanya dilaporkan ke Polda Sumut tetapi para guru yang menjadi korban juga melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Medan.

Perlu diketahui jika PTUN Medan telah mengajukan gugatan 103 guru honorer Langkat, dengan amar putusan membatalkan pengumuman kelulusan yang sebelumnya diumumkan oleh Plt. Bupati Langkat Syah Afandin.

Kemudian mencabut pengumuman tersebut, serta mewajibkan PJ. Bupati untuk mengemukakan kembali kelulusan para guru sesuai CAT.

Maka dari hal tersebut, tegas Irvan, membuktikan jika telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan seleksi PPPK Langkat tahun 2023 terkait fungsional guru.

"Oleh karena itu sudah barang tentu jika kelima tersangka tersebut harus ditahan," tegas Irvan lagi.

Kecurangan seleksi PPPK Langkat tahun 2023 sesungguhnya telah bertentangan dengan UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Tipikor, PermenpanRB Nomor: 14 Tahun 2023, Kemendikbud 298. ICCPR dan Duham. (bes/js)

Timpuk Dinasti...

Dari Halaman 1

yang menjadi awal mula kinerja pemberantasan korupsi merosot.

"Komisi Pemberantasan Korupsi semakin dibungkam, mengalami peleman dan penurunan kinerja. Padahal, sejak awal Presiden Joko Widodo akan menjalankannya pemerintahan dan janji pemberantasan korupsi lebih baik selalu digaungkan," ujar Seira di halaman Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/9).

"Tetapi kita tidak bisa memungkir dan melupakan bagaimana Revisi Undang-undang KPK tahun 2019 juga ada campur tangan Presiden Joko Widodo di dalamnya," sambungnya.

Ia juga menyinggung peristiwa penyingkiran puluhan pegawai KPK yang berintegritas lewat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Hari ini kita mengundang teman-teman semua yang merasa jadi korban dari Dinasti Mulyono, dinasti yang dibentuk Presiden Joko Widodo,

kami mengundang teman-teman ke sini untuk menyalurkan amarahnya, kekecewaannya, kita memperhatikan bagaimana dinasti yang dibentuk Presiden Joko Widodo turut membungkam dan melemahkan serta turut mematikan fungsi dari APH yang ada di Indonesia," tuturnya.

Dalam aksi tersebut, masyarakat sipil menampilkan aksi teatrikal dengan melempar cat sejumlah warna ke foto keluarga Jokowi yang ada di poster peringatan darurat.

Aksi #ReformasiDikorupsi menjadi puncak kemarahan publik atas agenda legislasi DPR dan pemerintah sesudah Reformasi 1998. Akhir September 2019 lalu, puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya di banyak daerah turun ke jalan memprotes pengesahan perubahan UU KPK.

Aksi tersebut seketika berubah menjadi kemarahan setelah dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, La Randi dan Muhammad Yusuf Qardhawi tewas akibat ditembak polisi saat melakukan aksi unjuk rasa. (cnni/js)



Hidayah

Dari Halaman 1

Tingkat kepercayaan meningkat ketika ada transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Kasus korupsi yang terungkap dapat menurunkan kepercayaan publik, meskipun ada upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan.

Masyarakat yang merasa dilibatkan dalam proses demokrasi cenderung lebih percaya pada pemerintah. Informasi yang disampaikan oleh media dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Secara umum, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dapat berubah seiring dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi

Pembubaran diskusi kebangsaan dapat menimbulkan beberapa dampak yang signifikan yakni hilangnya forum untuk berdiskusi bisa mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan.

Akan berdampak pada potensi ketegangan sosial: Tanpa wadah untuk meny-

ampaikan pendapat, isu-isu penting bisa terpendam dan menyebabkan ketegangan di masyarakat.

Diskusi kebangsaan sering kali menjadi tempat untuk bertukar ide dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi bangsa. Tanpa ini, inovasi bisa terhambat.

Tanpa ruang untuk berdialog, masyarakat bisa terjebak dalam sudut pandang yang sempit dan berpotensi memperkuat polarisasi.

Ada beberapa spekulasi terkait pelaku kerusuhan dalam diskusi kebangsaan yang terjadi. Dugaan bahwa pelaku adalah orang suruhan sering kali muncul dalam konteks ketegangan politik. Namun, untuk memastikan kebenaran tersebut, perlu dilakukan investigasi yang mendalam oleh pihak berwenang.

Faktor-faktor seperti tujuan di balik kerusuhan, identitas pelaku, dan konteks situasi politik akan sangat menentukan. Memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara transparan penting untuk memberikan kejelasan dan mencegah asumsi yang tidak berdasar. ***

Hendry CH...

Dari Halaman 1

2011. "Kami akan menjaga kondusivitas Gedung Dewan Pers dengan bekerja sama dengan pihak keamanan. Situasi akan tetap terkendali, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai," tambahnya.

Hendry Ch Bangun optimistis konflik internal ini dapat diselesaikan melalui dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif. Ia berharap, semua pihak bersikap bijak demi menjaga nama baik organisasi dan kepentingan bersama.

Terkait dengan keabsahan PWI Pusat di bawah kepemimpinan HCB, juga didukung oleh pernyataan dari Ketua dan Sekretaris PWI Provinsi. Di antaranya dari PWI Provinsi se- Kalimantan, PWI di Sumatera, Yogyakarta, Surakarta serta di Indonesia Timur. Kecuali ada beberapa PWI daerah yang hadir di KLB.

Isi pernyataan tersebut, pertama bahwa PWI tidak pernah secara lisan maupun tertulis meminta penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kepada Pengurus Pusat PWI masa bakti 2023-2028; kedua, PWI Provinsi tidak pernah membuat mandat dan/atau mengirimkan utusan sebagai peserta dari PWI Provinsi Sumatera Selatan pada Kongres Luar Biasa

PWI tanggal 18 Agustus 2024 di Jakarta; selanjutnya, PWI Provinsi Sumatera menolak penyelenggaraan KLB PWI tanggal 18 Agustus 2024 di Jakarta dengan segala hasilnya dan menetapkan KLB PWI tanggal 18 Agustus 2024 adalah tidak sah karena tidak sesuai Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga PWI; dan PWI Provinsi mendukung Pengurus Pusat PWI membekukan PWI Provinsi yang membuat mandat dan/atau mengirimkan utusan dan/atau pada KLB PWI tanggal 18 Agustus 2024 di Jakarta; PWI Provinsi yang tetap mendukung PWI yang sah hasil kongres PWI di Bandung hanya mengakui Pengurus Pusat PWI dibawah Hendry Ch Bangun sebagai Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung tanggal 25 September 2023 yang telah dibuatkan akta dihadapan notaris Dwi Yantoro S.H., M.Kn., dengan akta nomor 13 tanggal 14 November 2023 dan telah disahkan Surat Keputusan Menkumham nomor AHU-0001588.AH.01.08.TAHUN 2023 tanggal 17 November 2023 yang terakhir diubah dengan akta dihadapan notaris Dwi Yantoro, S.H., M.Kn., dengan akta nomor 10 tanggal 8 Juli 2024 dan disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham nomor AHU-0000946.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 9 Juli 2024. (A-02)

Polda Metro...

Dari Halaman 1

TNI, Mabes Polri, dan Pemda sebanyak 1.023 personel.

Polisi juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengatasi potensi gangguan yang terjadi selama proses pelantikan.

Akan tetapi, ia menyebut penerapan rekayasa lalu lintas itu masih bersifat situasional, tergantung pada kondisi kepadatan lalu lintas di sekitar area Senayan.

"Polisi akan melakukan pengalihan arus lalu lintas jika terjadi kepadatan di sekitar Senayan, Jakarta Pusat," tuturnya.

Ia mengimbau agar masyarakat dapat mengantisipasi pengalihan arus lalu lintas dan mengambil rute alternatif lainnya selama pelantikan. "Kami mengimbau masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari rute alternatif lain guna menghindari kepadatan lalu lintas," jelasnya. (cnni/js)

Propam Dalam...

Dari Halaman 1

Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa.

"Sampai saat ini Bidpropam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan kepada 11 petugas dari Polres, Polsek, dan Polda," jelasnya.

Ade Ary tidak merincikan siapa saja anggota yang telah diperiksa Propam Polda Metro tersebut. Hanya saja ia membenarkan apabila salah satu yang diperiksa merupakan Kapolsek Mampang Kumpul Edy Purwanto.

Di sisi lain, Ade Ary menyebut pemeriksaan juga dilakukan kepada dua warga sipil yang berada di lokasi pada saat aksi pembubaran berlangsung. Keduanya yaitu petugas keamanan di Manajer Hotel Grand Kemang.

FTA sebelumnya menggelar diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu

(28/9). Diskusi tersebut tiba-tiba dibubarkan sekelompok orang dan sempat menuai keributan.

Diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Din Syamsudin, dan sejumlah tokoh lain itu tiba-tiba didatangi masa. Bahkan sekelompok orang telah hadir di lokasi dan melakukan orasi di depan hotel sebelum acara dimulai.

Polda Metro Jaya pun telah menangkap lima orang terkait kasus pembubaran diskusi FTA itu. Dua di antaranya jadi tersangka dengan dijerat pasal penganiayaan dan perusakan.

Mereka dijerat dengan pasal perusakan dan penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (cnni/js)

Kapolri: Tindak...

Dari Halaman 1

kan premanisme dan anarkis yang dilakukan kelompok masyarakat manapun dan dengan alasan apapun," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (30/9).

Truno mengatakan pihaknya juga turut memecat keras aksi pembubaran paksa yang dilakukan sejumlah pihak tersebut. Ia mengaku kepolisian telah melakukan langkah-langkah secara komprehensif dan cepat untuk melakukan, menangkap dan juga menetapkan tersangka. "Kami dari pihak Kepolisian Negara

Republik Indonesia juga memecat keras terkait dengan kegiatan tersebut yang dilakukan secara brutal kemarin di Kemang," tuturnya.

Lebih jauh, Truno juga mengimbau seluruh masyarakat untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban serta menjunjung tinggi perilaku toleransi antar warga negara.

"Kami juga turut mengimbau, mengajak kepada seluruh komponen elemen masyarakat agar saling menjaga keamanan dan ketertiban bermasyarakat," ujarnya. (cnni/js)

M. Nuh...

Dari Halaman 1

wujud pertanggungjawaban, paling tidak secara moral, sebagai berikut:

1. Kasus KM 50

Pada hari Selasa, 4 Juli 2023 Komite I DPD RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menkopolhukam (Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan), dalam hal ini Jaksa Agung dan BIN.

Pada kesempatan tersebut Muhammad Nuh menyampaikan hal terkait dengan 6 orang pemuda Indonesia yang gugur di Km 50 Tol Cikampek.

Menurut Komnas HAM, 4 di antaranya merupakan pelanggaran HAM. Nuh meminta agar masalah ini dituntaskan.

Mengingat masyarakat luas masih beranggapan bahwa keterlibatan pihak tertentu belum diungkap secara nyata.

2. Permasalahan Tanah di Sumatera Utara

Pada Rapat Kerja Komite I Selasa, 2 Juli 2024 dengan Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) BPN (Badan Pertanahan Nasional). AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), Muhammad Nuh menyampaikan agar kasus-kasus Pertanahan di Sumatera Utara segera diselesaikan.

Hal yang paling menonjol adalah terkait dengan eks HGU PTPN 2, sengketa Pertanahan lainnya.

3. Aspirasi FKPPN

Saat Ketua DPD RI, Bapak AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berkunjung ke Medan, FKPPN (Forum Komunikasi Purna-karya Perkebunan Negara) menyampaikan aspirasi, bahwa ada 10.820 Purna-karya (pensiunan) PTPN yang belum menerima Tunjangan Hari Tua, senilai rp. 835,1 M.

Muhammad Nuh melalui alat kelengkapan BAP (Badan Akuntabilitas Publik) menindak lanjut hal tersebut.

Dengan izin Allah SWT secara bertahap hak para pensiunan itu di dapatkan.

4. Masalah Kepemiluan

Pemilu serentak (Pilpres dan Pemilu Legislatif) membawa korban yang tidak biasa

dianggap ringan.

Pada Pemilu serentak 2019, 894 petugas KPPS meninggal dunia, dan 5.275 petugas KPPS sakit.

Sedangkan pada Pemilu serentak 2024, data Kemenkes. Disebutkan 57 petugas KPPS meninggal dan 8.381 petugas KPPS lainnya sakit.

Oleh karena itu, Sabtu 6 April 2024, Nuh mengadakan FGD (Focus Group Discussion) yang melibatkan para tokoh dan pakar.

Mengemuka ketika itu adanya pemikiran agar dipisah antara pemlu nasional (Presiden, DPR, dan DPD RI), Provinsi (Pemilihan Gubernur dan anggota DPRD Provinsi) dan Pemilihan daerah (memilih Bupati, Walikota dan Wakil Gubernur/Kota). DPRD Kabupaten/Kota).

5. Penguatan MPR RI

Sebagai anggota Badan Pengkajian MPR RI, selalu melakukan dialog dengan para pakar, khususnya bidang Tata Negara dari berbagai Perguruan Tinggi.

Di era Reformasi, peran MPR RI tidak seperti di masa sebelumnya sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang memilih Presiden dan Wakil presiden... Bahkan presiden disebut sebagai mandataris MPR.

Kini kewenangan MPR RI sangat terbatas, padahal masih diperlukan kehadiran MPR RI yang dapat dirasakan dalam kebaikan negeri ini.

Karena itu, Muhammad Nuh mendukung adanya PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) yang dulunya bernama GBHN (Garis Besar Haluan Negara).

1 Oktober 2024, Muhammad Nuh dilantik untuk periode kedua sebagai anggota DPD RI/MPR RI.

Tentu masih sangat banyak hal yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Pada Pemilu 2024 lalu, Muhammad Nuh meraih 618.241 suara dari masyarakat Sumatera Utara. Nuh mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya...

Semoga kedepan dapat lebih intens komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. (A-02)